

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global saat ini. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses jangka panjang di mana suatu negara mengalami peningkatan kapasitas dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya (Jhingan, 2011). Menurut Kuznets dalam Jhingan (2011), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kemajuan teknologi, kualitas kelembagaan, dan sumber daya manusia, maupun eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat pendapatan dan pertumbuhan antar negara.

Sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kinerja perekonomian suatu negara. Negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi umumnya menunjukkan peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang menggambarkan total output barang dan jasa suatu negara (Andinata et al., 2018).

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antar negara di dunia semakin erat yang mengakibatkan batas-batas administrasi menjadi tipis

dimana hubungan antar negara-negara meliputi hubungan ekonomi baik perdagangan, keuangan, politik dan sosial budaya. Salah satu organisasi tersebut

SEAN (Association Southeast Asian Nation) yang merupakan organisasi



atau himpunan dari sepuluh negara yang geografis terletak di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama dibidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Perekonomian suatu negara saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar negara lain, seperti dalam perekonomian di ASEAN. Kenaikan perekonomian satu negara ASEAN menjadi pemicu di negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negaranya.

ASEAN-5 sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada lima negara dengan perekonomian yang relatif stabil di antara negara ASEAN lainnya, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Kamboja. Kelima negara ini memiliki kesamaan karakteristik sebagai negara berkembang yang tengah berupaya memperkuat fondasi ekonominya melalui arus foreign direct investment (FDI). Selain itu, negara-negara tersebut juga menghadapi tantangan yang serupa, yaitu risiko middle income trap, di mana pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat ketika transisi menuju status negara berpendapatan tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan inovasi.

Sementara itu, negara-negara ASEAN lainnya tidak dimasukkan dalam lingkup penelitian ini karena tingkat ketidakstabilan ekonomi yang relatif lebih tinggi serta keterbatasan ketersediaan data makroekonomi pada beberapa periode waktu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi hasil analisis dan mengganggu validitas temuan penelitian. Selain itu, perbedaan karakteristik ekonomi serta kebijakan domestik yang cukup signifikan antara negara-negara di

s penelitian juga berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi hasil.

, perbedaan karakteristik ekonomi serta kebijakan domestik yang cukup



signifikan antara negara-negara di luar fokus penelitian juga berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi hasil.

Lebih jauh, dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN tidak terlepas dari tantangan struktural jangka menengah, salah satunya adalah risiko middle income trap. Egawa (2013) menjelaskan bahwa middle income trap terjadi ketika negara-negara berpendapatan menengah mengalami kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, sehingga gagal untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Situasi ini kerap dialami oleh negara berkembang yang tidak mampu melakukan transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Ito (2017) menegaskan bahwa untuk keluar dari jebakan tersebut, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung penciptaan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor industri berteknologi tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang khususnya di negara ASEAN-5 juga sangat rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi global maupun internal.

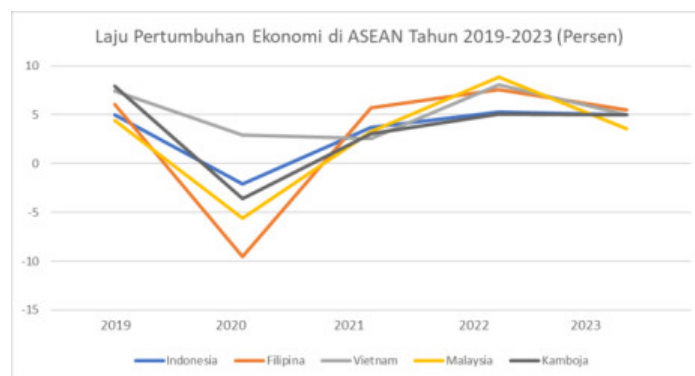
Salah satu fluktuasi ekonomi global yang berdampak signifikan pada perekonomian di ASEAN-5 adalah pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan gangguan besar pada aktivitas ekonomi global akibat pembatasan mobilitas, penutupan sementara sektor usaha, serta gangguan rantai pasok internasional. Menurut Asian Development Bank (2020), pandemi covid-19 mengakibatkan kontraksi ekonomi yang tajam di banyak negara berkembang di Asia, yang ditandai dengan penurunan tajam dalam konsumsi domestik, investasi, dan perdagangan internasional. Selain itu, tingginya



istian dan gangguan pasar tenaga kerja meningkatkan tingkat
guran dan kemiskinan. Interdependensi ekonomi antar negara juga

memperparah dampak ini, sehingga negara-negara di kawasan Asia harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter secara cepat untuk menstabilkan perekonomian dan memitigasi risiko resesi berkepanjangan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia, khususnya negara di ASEAN-5 menurun.

Gambar 1. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-3 Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: *World Bank*, diolah

Gambar 1.1 diatas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5, selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda pada tahun 2020. Pada tahun 2019, seluruh negara mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi positif, dengan Vietnam dan Kamboja mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi, yang mencerminkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan aktivitas produksi sebelum terjadi krisis global. Namun, pada tahun 2020, hampir seluruh negara di ASEAN-5 mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam sebagai akibat dari pembatasan aktivitas ekonomi dan gangguan rantai pasok global.



Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak bagi bidang kesehatan, tetapi perekonomian dan perdagangan di seluruh dunia. Pandemi covid-19 berdampak terhadap ekonomi global karena aktivitas masyarakat terganggu akibat

kebijakan *lockdown* atau pembatasan aktivitas lain. Hal itu menyebabkan banyak sektor industri dan perdagangan mengalami penurunan produktivitas yang signifikan, khususnya usaha yang memerlukan kehadiran orang secara fisik yang cukup banyak.

Perlambatan aktivitas ekonomi dalam perdagangan dan konsumsi dapat diperlihatkan melalui tingkat PDB sepanjang tahun 2020 yang mengalami penurunan sangat tajam di berbagai negara hingga banyak negara mengalami resesi. Resesi merupakan penurunan produktivitas ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan PDB yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa negara Filipina mengalami kontraksi terdalam hingga -9,5 persen, disusul oleh Malaysia dan Indonesia. Satu-satunya negara yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif adalah Vietnam, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,9 persen, menandakan ketahanan struktural ekonomi yang relatif lebih kuat dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN.

Memasuki tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi mulai pulih di seluruh negara ASEAN-5, dengan pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Malaysia dan Vietnam pada 2022. Pemulihan ini didorong oleh pelonggaran kebijakan pembatasan serta perbaikan aktivitas ekonomi domestik dan global. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan stabil di kisaran 4 hingga 5 persen, menandakan fase konsolidasi pasca-pemulihan, negara-negara ASEAN-5 mampu menunjukkan pemulihan yang cukup solid dalam jangka menengah. Namun, dalam rangka *recovery* kondisi perekonomian setelah resesi global 2020 sekaligus menghindari *middle income trap* diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan



faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5.

Investasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Investasi telah memainkan peranan krusial dalam pembentukan pasokan dan jaringan produksi di Asia Tenggara. Ketika investor menanamkan modalnya, maka akan ada lapangan pekerjaan yang dapat diserap sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Mahrus, 2014). Investasi asing langsung (FDI) menjadi pendorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara terlebih bagi negara sedang berkembang (Susanti, 2019). Hal ini didasari oleh mayoritas negara berkembang yang masih banyak bergantung pada pembiayaan luar negeri untuk pembangunan ekonominya.

Sebagian besar negara memilih arus masuk investasi asing sebagai arus modal yang menarik karena sifatnya yang stabil, volatilitas yang rendah, dan komitmen jangka panjang di negara tuan rumah serta dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek transfer teknologi (Sawalha & Suliman, 2016). Akan tetapi, minat atau keinginan investasi di kalangan investor asing banyak dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara yang akan dimasuki, seperti stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut. Selain itu, setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan investasi yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyulitkan perusahaan asing yang ingin beroperasi di beberapa negara tujuan investasi karena mereka harus berurusan dengan beragam peraturan dan persyaratan (Case & Ray, 2007).

Foreign direct investment (FDI) terus berkembang pesat di seluruh dunia.



pasar negara berkembang terus berupaya meningkatkan daya tarik bagi asing untuk menyerap lebih banyak arus modal terlebih masuknya FDI.

Menurut UNCTAD, sepanjang 2023 negara-negara ASEAN menerima investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) sebesar US\$226,32 miliar. Angka tersebut setara 17% dari total aliran FDI secara global. Dimana Singapura menjadi tujuan utama investasi asing di ASEAN dengan nilai investasi sebesar US\$159,67 miliar, setara 71% dari total modal asing yang masuk di ASEAN. Kemudian Indonesia menjadi tujuan terbesar kedua dengan arus masuk FDI sebesar US\$21,63 miliar, setara 10% dari total investasi asing di ASEAN.

Namun, perkembangan aliran FDI di dunia juga terhambat akibat pandemi Covid-19. Dalam *World Investment Report 2020* disebutkan bahwa adanya kebijakan lockdown dan terjadinya *demand shock* akibat pandemi covid-19 diperkirakan menyebabkan penurunan aliran FDI mencapai 40% pada tahun 2020 dan diproyeksikan berlanjut hingga tahun 2021. Angka tersebut lebih besar dari penurunan aliran FDI saat krisis ekonomi global 2008. WIR 2020 juga menyebutkan penurunan ini lebih berdampak pada aliran FDI ke negara-negara berkembang dari pada negara maju. Hal itu disebabkan perusahaan multinasional membatasi anggaran investasinya akibat pembatasan aktivitas perekonomian sehingga menghambat aliran FDI di negara berkembang. Bahkan, prediksi aliran FDI ke Asia yang merupakan tujuan terbesar aliran FDI saat ini akan turun sebesar 30-45% (*United Nations Conference on Trade and Development, 2020*).

Pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan, mendukung dan menunjang pembangunan ekonomi serta berupaya meningkatkan pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal yang bertujuan untuk meningkatkan output suatu wilayah atau negara. Peran pemerintah dalam



ekonomi sangat vital. Hal tersebut diwujudkan dalam belanja pemerintah. Pemerintah adalah alat fiskal yang berkedudukan kuat dari kebijakan

ekonomi lainnya dan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi. Maharani (2014) mengatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja pemerintah diwujudkan dalam ukuran sektor publik. Nowbutsing (2014) berpendapat, apabila belanja pemerintah meningkat maka akan memunculkan multiplier effect kepada perekonomian yang akan menghasilkan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori ekonomi Keynes, belanja pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat (*agregat demand*) di masyarakat. Belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah adalah bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi alokasi melalui koreksi kegagalan pasar, mendistribusikan sumber daya secara adil, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas. Menurut aliran Keynesian, belanja pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian secara agregat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Ambya, 2020).

Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara di kawasan ASEAN telah melakukan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek pembangunan melalui alokasi belanja pemerintah. Namun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar negara anggota. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas alokasi belanja publik dan apakah pengeluaran tersebut telah diarahkan secara optimal ke sektor-

strategis yang mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor infrastruktur dan pendidikan, misalnya, secara



konsisten mendapatkan prioritas dalam portofolio belanja kementerian. Sebaliknya, sektor penting lainnya seperti kesehatan sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Efektivitas belanja pemerintah ini sangat bergantung pada berbagai faktor, antara lain kapasitas fiskal negara, kualitas institusi, dan tingkat modal manusia yang tersedia. Tanpa adanya pengawasan kelembagaan yang kuat yang dalam banyak kasus masih lemah risiko ketidaksesuaian antara prioritas belanja dan kebutuhan riil ekonomi menjadi semakin besar. Selain itu, inefisiensi birokrasi dan praktik korupsi yang masih terjadi dapat menyebabkan pemborosan anggaran secara signifikan, sehingga menghambat efektivitas belanja pembangunan dan memperlambat proses pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nurnaddia et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik yang dimilikinya. Salah satu bentuk stabilitas politik adalah institusi politik. Mankiw (2003) dan Blanchard (2006) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Blanchard (2006) menambahkan bahwa sebuah institusi akan berperan penting dalam menjaga kestabilan politik sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih jauh lagi, berbagai indikator muncul untuk mengukur bagaimana faktor politik mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat korupsi menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI).



stitusi yang buruk memiliki potensi untuk memicu ketidakstabilan sosial k dalam masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dapat muncul karena

kegagalan institusi dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi mereka. Hal ini bisa mencakup kurangnya pelayanan publik yang memadai, tingkat korupsi yang tinggi, ketidakadilan, atau ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketidakpuasan ini kemudian dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan protes atau tindakan tidak stabil sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka (Alesina & Perotti, 1996).

Kualitas institusi yang buruk juga dapat memiliki dampak negatif pada berbagai aspek masyarakat dan ekonomi (Fomba et al., 2023). Kualitas institusi yang buruk dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena menghambat investasi, inovasi, dan efisiensi pasar (Rodrik et al., 2004). Selain itu, institusi yang buruk cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar karena memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak-pihak tertentu dan membatasi akses yang adil ke sumber daya (Banerjee & Duflo, 2003). Dengan kata lain, lemahnya institusi dapat membatasi akses masyarakat miskin terhadap sumber daya yang ditujukan untuk mereka.

Sementara itu, institusi yang baik, seperti yang didefinisikan oleh Douglas North, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, memfasilitasi investasi, dan menciptakan kestabilan yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (North, 1990). Beberapa studi telah menyoroti pentingnya institusi dan sistem kelembagaan dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Acemoglu & Robinson (2012) mengemukakan bahwa institusi politik dan ekonomi yang inklusif dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara institusi yang eksklusif cenderung menghambat perkembangan ekonomi. Selain

itian yang dilakukan oleh Barro (1998), Valeriani & Peluso (2011), dan (2015) menemukan bahwa institusi mempunyai dampak positif terhadap



pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mauro (1995) dan Hall & Jones (1999) mengungkapkan adanya korelasi positif antara institusi yang kuat, transparan, dan efisien serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *foreign direct investment* (FDI), belanja pemerintah, dan stabilitas politik memiliki peran yang signifikan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5. Negara-negara ASEAN-5 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih menghadapi tantangan dalam daya tarik investasi asing, efektivitas belanja publik, dan stabilitas politik. FDI berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun manfaatnya sangat bergantung pada kualitas kebijakan investasi dan stabilitas institusional di masing-masing negara anggota ASEAN-5. Sementara itu, tingginya belanja pemerintah tidak selalu menjamin pertumbuhan yang optimal apabila tidak disertai dengan tata kelola yang baik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat menghambat efektivitas pengelolaan anggaran negara dan menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Salah satu penyebab utama ketidakstabilan politik tersebut adalah tingginya tingkat korupsi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh *foreign direct investment* (FDI), belanja pemerintah, dan stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Sijabat (2023) mengkaji tentang *the association between foreign investment and gross domestic product in ten ASEAN countries*,

dan bahwa dalam jangka pendek maupun panjang, FDI memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ditemukan adanya hubungan



kausalitas bilateral antara *foreign direct investment* (FDI) dan pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh negara ASEAN yang diteliti. Selanjutnya, Nhemhafuki (2023) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 117 negara, dan menyatakan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan jika dialokasikan secara produktif. Penelitian lain oleh Lutfi et al. (2020) menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara ASEAN selama periode 2004–2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan secara statistik.

Namun demikian, sebagian besar studi sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Pertama, meskipun banyak kajian yang membahas pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, sebagian besar masih terbatas pada pendekatan umum tanpa mengkaji secara menyeluruh keterkaitan antar variabel utama seperti FDI, belanja pemerintah, dan stabilitas politik dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Kedua, variabel-variabel tersebut sering kali diteliti secara parsial, sehingga belum mencerminkan hubungan simultan dan kompleks antar faktor-faktor struktural yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ketiga, masih ditemukan perbedaan hasil antar studi, terutama terkait stabilitas politik dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan adanya inkonsistensi empiris yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara simultan pengaruh *foreign direct investment* (FDI), belanja pemerintah, dan stabilitas politik terhadap

umbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 selama periode 2009 -2023 dengan menggunakan pendekatan data panel dinamis.



Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, mengoptimalkan belanja pemerintah, serta meningkatkan transparansi pemerintahan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh *Foreign Direct Investment*, Belanja Pemerintah, dan Stabilitas Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN-5”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *foreign direct investment* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023?
2. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023?
3. Apakah stabilitas politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *foreign direct investment* terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023
3. Untuk menganalisis pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023



3. Untuk menganalisis pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 tahun 2009-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan maupun penyelesaian masalah operasional sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dalam memahami perkembangan *foreign direct investment*, belanja pemerintah, dan stabilitas politik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di negara ASEAN-5.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan *foreign direct investment*, belanja pemerintah, dan stabilitas politik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi.
- b. Memberikan informasi bagi pihak lain sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya atau sebagai pelengkap penelitian lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori Keynesian

Keynes pertama kali mengemukakan teori Keynesian secara resmi pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul "*The General Theory of Employment, Interest and Money*". Buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil dijawab oleh metode klasik dan neo klasik. Keynes memperkenalkan gagasan "*fundamental uncertainty*", yang disajikan dalam bab 12 Teori Umum, berjudul "*The state of long-term expectation*". Keynes menghubungkan ketidakpastian fundamental dengan permintaan investasi. Namun, itu bukanlah implikasi teoretis utamanya. Sebaliknya, seperti yang dikemukakan Davidson (1972), ketidakpastian fundamental sangat penting karena menjelaskan keberadaan uang. Dalam dunia ketidakpastian fundamental, para pelaku pasar membutuhkan simpanan nilai yang likuid untuk menghadapi ketidakpastian. Hal ini memberikan fondasi mikro bagi uang, dan uang kini dapat menjadi tempat pembuangan yang memerangkap daya beli dan mengurangi daya beli. Ekspektasi tentang masa depan yang secara fundamental tidak pasti akan memengaruhi permintaan uang dan pengeluaran, termasuk investasi.

Ekspektasi jangka panjang merupakan faktor kunci dalam keputusan investasi, tetapi sifatnya sangat rapuh karena dipengaruhi oleh ketidakpastian fundamental. Stabilitas ekonomi dan politik juga sangat penting untuk menjaga si positif. Tanpa itu, *animal spirits* bisa berubah menjadi pesimisme, akan investasi, dan memperburuk siklus ekonomi. Menurut Keynes, akan terjadi apabila *marginal efficiency of capital* (MEC) dari proyek atau



asset lebih besar dari tingkat bunga pasar (*interest rate*). MEC adalah ukuran *expected profitability* dari unit modal terakhir yang dipertimbangkan untuk dibeli; karena itu keputusan investasi adalah keputusan perbandingan antara pengembalian yang diharapkan dan biaya penggunaan modal saat ini.

Prinsip utama dari pemikiran Keynes adalah bahwa intervensi pemerintah dapat menstabilkan ekonomi. Menurut ekonomi keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan siklus ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi adalah dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran di pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang yang tidak diminati oleh sektor swasta.

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah teori klasik keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Sukirno, 2006). Teori ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan permintaan agregat,

terutama pada kondisi ketika perekonomian mengalami pelemahan atau

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam pendekatan



Keynesian adalah belanja pemerintah (*government expenditure*), baik dalam bentuk konsumsi publik maupun investasi. Dalam konteks ini, peningkatan belanja pemerintah diyakini dapat menstimulasi kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan secara keseluruhan melalui efek multiplier.

Permintaan agregat adalah kekuatan pendorong yang paling penting dalam suatu perekonomian. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat yang tidak memadai dapat menyebabkan pengangguran tinggi yang berkepanjangan. Perekonomian barang dan jasa (Y) adalah jumlah dari empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Setiap peningkatan permintaan harus berasal dari salah satu dari empat komponen ini. Ungkapan lainnya yang dapat menggantikan variabel ekonomi agregatif ini antara lain ialah belanja pemerintah untuk barang dan jasa atau *government purchase of goods and services*, yang sering juga hanya disingkat belanja pemerintah atau *government expenditure* yang sering disimbolkan dengan G . Dari istilah-istilah tersebut jelas bahwa belanja-belanja pemerintah di mana pemerintah secara langsung memperoleh balas jasa atas pengeluaran tersebut sajalah yang dapat kita masukan ke dalam kategori variabel ekonomi agregatif G . Namun pengeluaran-pengeluaran seperti pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk dan berbagai macam bantuan finansial yang diberikan kepada sektor swasta tidak dapat dimasukan kedalam kategori ini karena harus dimasukan ke dalam kategori transfer pemerintah (Reksoprayitno, 2000).

Tetapi selama resesi, kekuatan yang kuat sering kali mengurangi permintaan seiring dengan belanja yang turun. Misalnya, selama krisis ekonomi konsumen sering mengikis kepercayaan konsumen, menyebabkan mereka mengurangi pengeluaran mereka. Pengurangan pengeluaran konsumen ini



menjadikan pengeluaran investasi yang lebih sedikit oleh sektor bisnis, karena perusahaan merespon melemahnya permintaan untuk produk mereka. Disinilah peran pemerintah menjadi penting. Menurut ekonomi Keynesian, intervensi pemerintah diperlukan untuk memoderasi siklus bisnis dalam perekonomian (Jahan et al., 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam Jahan et al., (2014), terdapat tiga prinsip utama Keynesian untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja, yaitu:

1. Permintaan agregat dipengaruhi oleh banyak keputusan ekonomi, baik oleh publik/pemerintah maupun sektor swasta. Keputusan sektor swasta terkadang dapat merugikan kondisi makroekonomi, seperti turunnya belanja konsumen selama resesi. Kegagalan pasar ini terkadang memerlukan kebijakan aktif dari pemerintah, seperti paket stimulus fiskal. Oleh karena itu, ekonomi Keynesian mendukung ekonomi campuran dipandu terutama oleh sektor swasta tetapi sebagian juga dioperasikan oleh pemerintah.
2. Harga dan upah bersifat kaku, lambat merepon perubahan supply dan demand di pasar, mengakibatkan sering terjadi surplus dan shortage tenaga kerja.
3. Perubahan permintaan agregat, baik yang diantisipasi ataupun yang tak terduga, memiliki efek jangka pendek terbesar pada output riil dan kesempatan kerja, bukan pada harga. Keynesian percaya bahwa, karena harga bersifat kaku, fluktuasi dalam komponen pengeluaran baik melalui konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah akan menyebabkan output berubah. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, misalnya, dan



semua komponen pengeluaran lainnya tetap konstan, maka output akan meningkat.

Model kegiatan ekonomi Keynesian juga mencakup efek pengganda yaitu output berubah oleh beberapa kelipatan dari kenaikan atau penurunan pengeluaran yang menyebabkan perubahan. Jika pengganda lebih besar dari satu, maka satu dolar peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan peningkatan dalam output lebih besar dari satu dolar.

2.2 Tinjauan Empiris

Ichvani & Sasana (2019) meneliti pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 dengan menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar satu poin, yang mencerminkan penurunan tingkat korupsi, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,072 persen.

Karimov et al. (2024) meneliti dampak arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Türkiye selama periode 2006 kuartal kedua hingga 2019 kuartal keempat, menggunakan pendekatan ARDL dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Türkiye. Selain itu, analisis kausalitas Granger mengungkap adanya hubungan dua arah antara FDI dan Produk Domestik Bruto (GDP), yang berarti peningkatan FDI mendorong pertumbuhan ekonomi. dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat menarik lebih banyak



Firman (2021) meneliti pengaruh belanja pemerintah dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN-5 menggunakan panel ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ichvani dan Sasana (2019), yang juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Poku et al. (2022) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Ghana selama periode 1970 hingga 2016, menggunakan pendekatan ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Ghana dalam periode waktu yang lebih singkat.

Penelitian lain oleh Nawatmi (2016) yang memfokuskan pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mengonfirmasi temuan serupa. Nawatmi menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sifat investasi dan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak langsung. Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, misalnya membutuhkan waktu sebelum hasilnya terlihat dalam bentuk pertumbuhan yang meningkat. Dampaknya baru akan terasa di masa mendatang ketika



infrastruktur yang dibangun mulai mendukung aktivitas ekonomi secara lebih efektif.

Penelitian Widianatasari (2021) yang meneliti pengaruh kualitas institusi, pengeluaran pemerintah, dan *foreign direct investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di ASIA-9 menunjukkan bahwa FDI secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASIA-9 selama periode 2012-2019. Namun, penelitian ini juga menemukan arah hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi ternyata berlawanan. Artinya, semakin tinggi proporsi arus masuk FDI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), justru dapat berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia-9. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun FDI dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, adanya ketergantungan yang terlalu besar pada FDI dapat menyebabkan dampak negatif dalam hal pengelolaan sumber daya dan peningkatan ketergantungan ekonomi luar negeri.

Vinayagathan & Ramesh (2022) meneliti hubungan antara korupsi dan kemiskinan di negara-negara SAARC selama periode 1996 hingga 2019, menggunakan pendekatan panel ARDL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika tingkat korupsi melebihi ambang batas tertentu. Studi ini menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wulandari (2023) meneliti pengaruh keterbukaan perdagangan, foreign investment (FDI), dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SEAN selama periode 2018–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

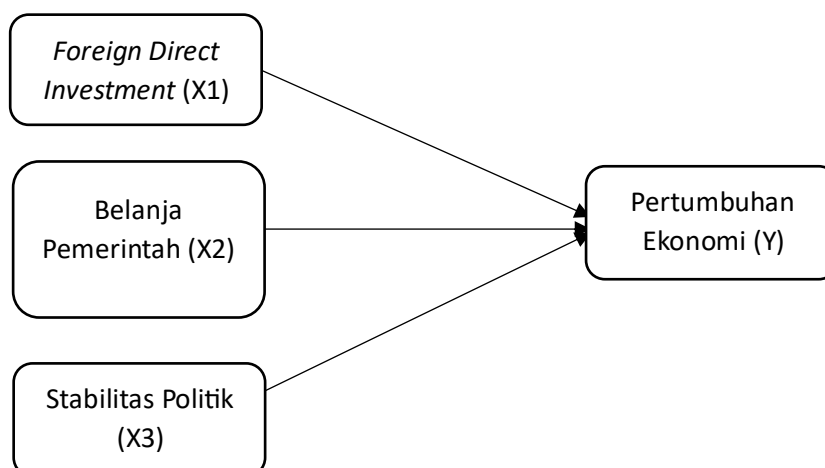


dalam jangka pendek, FDI dan ekspor memiliki dampak negatif, tetapi dalam jangka panjang FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memperkuat temuan Borensztein et al. (1998) yang menyatakan bahwa FDI berkontribusi terhadap pertumbuhan melalui transfer teknologi dan peningkatan efisiensi.

Nurudeen dan Usman (2010) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode 1979–2007 dengan menggunakan metode kointegrasi dan *error correction model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total belanja modal, total belanja rutin, serta pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor transportasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.3 Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Diduga *foreign direct investment* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5.
- b. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5.
- c. Diduga stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5.

